**“KERUSUHAN YANG TERJADI DI PAPUA DITINJAU DARI TUJUAN NEGARA DAN
TUJUAN LEGITIMASI NEGARA PANCASILA”**

PAPER

(Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Filsafat Pancasila dibimbing oleh
Bapak Agustinus W. Dewantara, S.S.,M. Hum)

DISUSUN OLEH

KUSPANITA

1843019001

FAKULTAS MIPA

PROGRAM STUDI BIOLOGI

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KAMPUS MADIUN

2019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang maha esa karena atas berkat dan karunianya saya bisa menyusun dan menyelesaikan paper ini dengan penuh kemudahan, karena tanpa pertolongan-Nya saya tidak mungkin bisa menyelesaikan paper ini dengan baik.

Paper ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang penghayatan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sudah mengalami pendangkalan pemahaman masyarakat indonesia terhadap isi dan nilai pancasila sesungguhnya yang saya sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber tentang "Kerusuhan di Papua"

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen mata kuliah filsafat pancasila yang telah memberikan saya tugas dalam pembuatan paper ini karena dengan paper ini saya bisa menambah pengetahuan tentang nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga dengan paper ini pembaca dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya sadar paper ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saya sangat membutuhkan kritik dan saran yang cukup membangun agar kedepannya paper ini bisa lebih baik lagi.

Madiun, 24 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A.LATAR BELAKANG	1
C. LANDASAN TEORI	5
I. Tujuan Negara " <i>the good life</i> "	5
II. Tujuan dan Legitimasi Negara Pancasila	6
D. KASUS KERUSUHAN PAPUA BARAT DITINJAU DARI TEORI TUJUAN NEGARA DAN LEGITIMASI NEGARA PANCASILA	6
1. Kasus Papua Barat di Tinjau dari Tujuan Negara	6
2. Kasus Papua Barat di Tinjau dari Tujuan dan Legitimasi Negara Pancasila	8
KESIMPULAN.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

ABSTRAK

Menganalisis perkembangan Papua Barat dari segi ekonomi dan berbagai macam latar belakang kehidupan sehingga membuat Papua Barat ingin merdeka atau ingin membuat Negara sendiri/memisahkan diri dari Negara Indonesia. Dan mengayomi masyarakat, terutama memberikan pemerataan keadilan terhadap seluruh warga negara Indonesia bukanlah hal yang mudah. Pro-kontra merupakan hal yang wajar, tergantung bagaimana cara menyikapinya. Keinginan Papua untuk menjadi negara sendiri, belum tentu dapat mengubah perekonomian Papua menjadi lebih baik. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan menjadi negara sendiri bukanlah hal yang mudah. Indonesia berusaha memberikan keadilan dengan cara perbaikan infrastruktur di Papua. Namun, adanya keinginan manusia yang tidak cepat mudah puas akan membutuhkan masyarakat Papua untuk bertindak nekad ingin menjadi negara sendiri. Maka perlunya pemikiran yang matang sebelum bertindak, karena hal ini akan berpotensi berakibat fatal jika pemisahan negara sendiri terjadi, bukannya menjadi negara yang maju dan sejahtera justru sebaliknya yang terjadi.

Kata kunci : Papua Barat, Negara, Pro-kontra

A.LATAR BELAKANG

Usia kemerdekaan Indonesia saat ini sudah mencapai 74 tahun dan ini bukanlah sebuah usia yang muda lagi. Jika Indonesia itu adalah seorang manusia atau individu maka itu adalah bukan sebuah usia yang produktif lagi atau bahkan banyak orang yang mungkin usianya tidak sampai ke situ sudah dipanggil oleh sang pencipta. Namun, apakah Indonesia sama dengan manusia atau individu tersebut? jawabannya tentu saja tidak. Namun pada saat ini ada beberapa individu, kelompok, golongan dan lain sebagainya berusaha untuk menghancurkan Indonesia. Kita tahu bahwa kondisi Papua tidak sama dengan kondisi kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai macam sektor kehidupan di sana, contohnya di dalam bidang ekonomi. Bagaimana keadaan ekonomi di Papua? apakah sama dengan di pulau Jawa? apakah sama dengan Jakarta? apakah sama dengan kota-kota besar lainnya? jawabannya tentu saja tidak. Mengapa demikian? karena Papua yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan kekayaan alam berlimpah yang tentunya mampu memberikan kontribusi besar bagi negara Indonesia ini mengundang banyak negara luar yang ingin memiliki atau menguasai tanah Papua. Hal inilah yang menjadi dasar permasalahan di Papua hingga saat ini menumbuhkan berbagai macam model permasalahan. Maka dari itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia membagi konflik tersebut menjadi empat macam yaitu :

Pertama, sejarah integrasi dan status identitas politik. Sebenarnya permasalahan yang pertama ini berdasar pada adanya perbedaan cara pandang antara Nasionalisme Indonesia dan Nasionalisme Papua atas sejarah peralihan kekuasaan Papua dari Belanda ke status politik Papua telah selesai hal ini ditandai dengan adanya PAPERA 1969 dan diterimannya hasil penentuan tersebut oleh majelis umum sidang PBB. Sementara nasionalisme Papua berpandangan bahwa PAPERA itu sendiri terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kedua, masalah kedua yaitu masalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Masalah ini muncul sebagai eksis dari pandangan keutuhan NKRI adalah harga mati dan gagasan memisahkan merupakan tindakan melawan hukum yang kemudian diidentifikasi secara militeristik. Sehingga, upaya tersebut diartikan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagai solusi untuk mengakhiri politik dan melanggar hak asasinya akibat pelaksanaan tugas memerangi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Negara seharusnya hadir sebagai institusi yang mensejahterkan justru muncul sebagai sosok yang berwajah sangar.

Ketiga, masalah ketiga yakni tentang kegagalan pembangunan, kegagalan pembangunan inilah yang dijadikan sebagai hal utama yang menjadi pangkal masalah di Papua. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan yang terjadi di bagian ekonomi dan pembangunan. jika dilihat dari kenyataan yang ada yaitu berkaitan dengan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam di Papua ini malah membuat pemerintah gagal melaksanakan pembangunan di Papua. Dan lebih menyedihkan lagi data pembangunan malah lebih banyak dilakukan sebelum pelaksanaan otsus. Keadaan ini semakin memburuk dengan

adanya tingkat kecemburuan sosial yang tinggi antara penduduk asli dan penduduk pendatang atas penguasaan bidang perekonomian.

Keempat, masalah keempat ini berkaitan dengan masalah marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan Otsus. Praktek marginalisasi ini jelas terlihat di Papua, hal ini dapat dilihat dari segi demografi, sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang sering kali diidentikan dengan kegiatan separatisme, sedangkan dari bidang politik terutama di jaman Orde Baru orang Papua tercatat menduduki jabatan gubernur.

Keempat konflik di atas tentu saja bukan konflik Papua saat ini, itu adalah sebuah konflik yang terjadi antar Indonesia dan Papua Barat pada beberapa tahun silam. Namun ada hal yang harus kita ketahui bahwa konflik Papua Barat saat ini dasarnya juga adalah konflik-konflik yang terjadi di beberapa tahun silam itu dan ditambah dengan berbagai macam adu domba oleh individu, kelompok dan golongan yang ingin memisahkan Papua Barat dari Indonesia demi kepentingan dan tujuan tertentu. (Chrisara. 2019)

B.KRONOLOGI

Pada tanggal 19 Agustus 2019, ribuan orang pengunjuk rasa di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Namun unjuk rasa ini berubah menjadi sebuah kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya gedung DPRD setempat. Menurut laporan pemerintah, ada tiga petugas polisi yang terluka akibat lemparan batu dari masa pengunjuk rasa. Selain fasilitas umum, beberapa barang pribadi juga dibakar. Saat itu ada beberapa orang masa pengunjuk rasa membawa bendera Bintang Kejora, yakni bendera lama Nugini buatan Belanda yang digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka, sambil menyorakkan slogan-slogan pro kemerdekaan. Di Indonesia tindakan tersebut bisa dihukum sampai 15 Tahun penjara. Wakil gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan bahwa ekonomi kota lumpuh semuanya akibat dari protes tersebut. Menurut juru bicara Komite Nasional Papua Barat, seorang pengunjuk perempuan ditembak di pergelangan kaki akibat mengikuti aksi unjuk rasa di Manokwari. Menurut pernyataan dari Angkatan Bersenjata Indonesia ada 300 tentara yang dikirim ke Manokwari pada tanggal 21 Agustus. Sedangkan di Jayapura, ratusan masa pengunjuk rasa memblokir jalan ke Bandara Sentani dan yang lebih parahnya menurunkan bendera Merah Putih di depan kantor gubernur.

Tidak hanya itu, unjuk rasa ini juga terjadi di Sorong, disana di kabarkan terdengar ada suara tembakan. Dan di Surabaya, beberapa masa pengunjuk rasa berpakaian topeng monyet atau sejenisnya karena mendengar cercaan monyet. Masa pengunjuk rasa ini menyerang Babdara Domine Eduard Osok dan melempari batu ke jendela kaca bandara sehingga gedung terminal mengalami kerusakan. Akibat ulah dari masa pengunjuk rasa ini untuk beberapa waktu operasi bandara sangat terganggu. Selain itu masa pengunjuk rasa juga membakar penjara kota yang mengakibatkan 258 orang narapidana serta tahanan melarikan diri dan beberapa penjaga penjara terluka. Meskipun demikian sebagian besar tahanan hanya melarikan diri dari api dan memeriksa keluarga mereka serta kebanyakan telah kembali ke penjara lagi.

Sedangkan di Timika ada sekita 4.000-5.000 masa pengunjuk rasa memprotes di kota penambangan Timika, yang mengakibatkan kerusakan pada sebuah hotel di dekat gedung DPRD kabupaten Mimika. Dan di depan gedung DPRD Mimika terjadi bentrokan lebih lanjut antara pengunjuk rasa dengan polisi. Para masa pengunjuk rasa ini menunggu bupati Mimika yakni Eltinus Omaleng. Di sini banyak masa pengunjuk rasa yang ditangkap lantaran merusak hotel dan memaksa toko reparasi mobil lokal menyediakan ban bagi pengunjuk rasa untuk dibakar. Tidak hanya itu, kejadian ini juga mengakibatkan tiga polisi terluka.

Pada tanggal 21 Agustus ribuan masa pengunjuk rasa juga berunjuk rasa di kota Fakfak. Disini masa pengunjuk rasa membakar gedung kantor, pasar lokal dan memblokir jalan menuju ke Bandara Torea Fakfak. Polisi pun selanjutnya mengambil tindakan menembakkan gas air mata ke masa pengunjuk rasa untuk membubarkan unjuk rasa tersebut. Menurut laporan juru bicara kepolisian Indonesia situasi aman terkendali, dan yang terlibat dalam pembakaran gedung pasar ada 50 orang saja, serta beberapa orang lainnya terluka akibat dari bentrokan tersebut.

Unjuk rasa juga terjadi di beberapa tempat seperti di Marauke, Nabire, Yahukimo, dan Biak, serta beberapa mahasiswa Papua di Jakarta juga melakukan unjuk rasa di depan gedung Kemendagri Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus. Pada tanggal 23 Agustus protes yang damai berlanjut dengan “mars panjang” di Kabupaten Sarmi. Di Yogyakarta, Denpasar dan Bandung juga diadakan demonstrasi yang memprotes rasisme terhadap mahasiswa Papua. Beberapa aktivis mencatat dan mengatakan bahwa unjuk rasa ini adalah salah satu unjuk rasa yang terbesar dan belum pernah terjadi di kota tersebut selama bertahun-tahun. Pada tanggal 26 Agustus, unjuk rasa ini masih berlanjut dan pengunjuk rasa mengibarkan bendera Papua Barat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara melakukan perlambatan akses internet di sekitar Sorong ini merupakan sebuah usaha penindak lanjutan untuk memerangi disinformasi. Tidak hanya itu, pihak Kementerian juga telah menutup akun media sosial yang “berbagi konten provokatif”. Namun penutupan atau perlambatan akses internet ini membuat unjuk rasa baru terhadap kementerian di Jakarta oleh organisasi hak asasi manusia setempat. Presiden Indonesia, Jokowi mendesak ketenangan dan mengatakan kepada orang Papua bahwa “Emosi itu boleh, tapi memaafkan lebih baik. Sabar juga lebih baik” Jokowi juga menyiapkan kunjungan ke wilayah tersebut. Sedangkan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Wiranto merilis pernyataan yang menjanjikan penyelidikan “lengkap dan adil” atas insiden di Surabaya dan menerangkan bahwa situasi Papua terkendali. Tito Karnavin selaku Kepala Kepolisian Nasional mengklaim bahwa kerusuhan itu terjadi akibat insiden di Surabaya dan perlakuan terhadap siswa yang terlibat, serta karena sebuah berita tipuan tentang salah satu siswa yang terbunuh saat penahana.

Wakil ketua DPR Fatdli Zon menyerukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden di Surabaya, sebagai respon Polisi daerah Jawa Timur membentuk Tim untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Uskup Ambon Petrus Canisius Mandagi juga menyerukan protes damai dan mengatakan bahwa orang Papua “tidak boleh biadab seperti mereka yang menyemburkan rasisme”. Anggota DPRP Yorrys Raweyai menyerukan pembubarab Banser Nahdlatul Ulama mengklaim bahwa pembubaran milisi tersebut adalah permintaan dari pengunjuk rasa di Sorong.

Tri Susanti seorang anggota di Partai Gerindra dan pemimpin unjuk rasa di Surabaya terhadap pelajar Papua, secara terbuka meminta maaf setelah protes di Papua dan membantah tuduhan kekerasan fisik terhadap para mahasiswa. Tokoh kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda mengatakan bahwa insiden di Surabaya telah “menyalakan api unggun rasisme, diskriminasi, dan penyiksaan orang Papua Barat selama hampir 60 tahun oleh Indonesia”. Pada tanggal 27 Agustus, Gubernur Papua Lukas Enembe mengunjungi gedung para mahasiswa di Surabaya, akan tetapi ia langsung ditolak oleh mereka, yang sebelumnya telah menolak semua pengunjung dengan memsang spanduk bertuliskan “siapa pun yang datang kami tolak” (Handayani. 2019)

C. LANDASAN TEORI

I. Tujuan Negara "*the good life*"

Pendiri negara pasti dengan suatu tujuan. Suatu tujuan dalam pendiri negara pertama-tama lebih merupakan idealisme, bukan objek sasaran langsung. Tujuan adalah itu yang dikejar dan diusahakan: Apakah "*the good life*?" dengan hidup baik dimaksudkan *happiness* apa elemen pengertian *happiness*?

1. Kebahagiaan menunjuk kepada *self-sufficient*; Aristoteles mengagaskan polis sebagai sistem hidup bersama dimaksudkan pertama-tama agar kebutuhan para anggotanya tercukupi. Sekurang-kurangnya kebutuhan fisik, ekonomi keamanan, pendidikan, dan segala sesuatu untuk dapat hidup cukup, meskipun *happiness* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material. *Happiness* yang dimaksudkan oleh Aristoteles juga menunjuk pada realisasi prinsip-prinsip keadilan dalam tata hidup bersama.
2. Keadilan dalam Aristoteles sangat penting. Keadilan menunjuk kepada "*equality*" yang memiliki karakteristik proporsional, bukan sekedar asal sama. Proporsional artinya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Apabila seseorang telah melakukan jasa lebih dari yang lain, dia memiliki pembagian lebih dari yang lain yang kurang berjasa. Itulah yang disebut dengan keadilan.
3. Kebahagiaan juga menunjuk pada aktivitas yang menghasilkan apa-apa yang mengatasi sekedar pemenuhan kebutuhan material. Aktivitas semacam ini nyata dalam apa yang disebut *leisure time* (waktu luang). Konsep *the good life* yang merupakan tujuan hidup bersama menyertakan pula realitas bahwa para anggota memiliki waktu luang. *Leisure* bukan waktu menganggur, juga bukan sekedar waktu istirahat (tidak berbuat apa-apa), melainkan saat dimana orang dapat membangun kedalaman kemanusiaannya. Waktu luang adalah saat belajar, berkomunikasi, berdiskusi, berkontemplasi, mendulang kedalaman. Peradaban Yunani kuno pada waktu itu kaya dengan aneka aktivitas humanis seperti sastra, puisi, retorika, filsafat, seni, dan seterusnya. Aneka aktivitas tersebut belum terealisasi dalam dunia seperti sekarang ini yang kita miliki dalam buku, majalah, surat kabar, dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas itu dihadirkan dalam suatu pertemuan-pertemuan di tempat-tempat terbuka, di taman-taman, di dekat kuil-kuil, dan sejenisnya. *Leisure* yang dimaksudkan Aristoteles menunjuk pada aktivitas-aktivitas yang memang sangat membangun peradaban budaya, filsafat dan humanisme.
4. Kebahagiaan atau *eudaemonia* harus pula tampak dalam aktivitas yang merealisasi keutamaan (*virtues*). Aristoteles memandang bahwa kesempurnaan manusia terpenuhi dalam sistem atau tata hidup bersama. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan manusia? Aristoteles tidak sedang menjelaskan kesempurnaan hidup rohani atau spiritual, melainkan sosialitas hidup manusia. Natura manusia yang adalah makhluk politik mau tidak mau meminta manusia untuk memperdalam dan mengembangkan dan memperdalam kapasitas-kapasitasnya. Yang dimaksud dengan kapasitas disini ialah segala kemampuan manusia untuk menampilkan keutamaan-keutamaan manusiawinya. Kebahagiaan, dalam filsafat Aristoteles, bukan sesuatu yang statis,

seperti menikmati, melainkan dinamis seperti aktivitas mengusahakan dan menapilakan keutaman-keutamaan kemanusiaan. Di sinilah kesempurnaan manusia terealisasi, yaitu dalam aktivitas mendulang sekaligus menjabarkan dalam hidup sehari-hari keutamaan-keutamaan hidupnya.

II. Tujuan dan Legitimasi Negara Pancasila

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 menulis tujuan dan Legitimasi Negara Indonesia:

“Atas nama berkat Allah Yang Mahakuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permusyawaratan;
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Wisnu. 2017)

D. KASUS KERUSUHAN PAPUA BARAT DITINJAU DARI TEORI TUJUAN NEGARA DAN LEGITIMASI NEGARA PANCASILA

1. Kasus Papua Barat di Tinjau dari Tujuan Negara

Berdasarkan teori Tujuan Negara “The good life”, sebuah negara didirikan tentu saja memiliki tujuan. Tujuan ini pertama-tama lebih merupakan idealisme, bukan objek sasaran langsung. Tujuan ini adalah itu yang dikejar dan diusahakan. Kebahagiaan menunjuk kepada *self-sufficient*; Aristoteles mengaggas *polis* sebagai sistem hidup bersama memaksudkan pertama-tama agar kebutuhan para anggotanya tercukupi. Sekurang-kurangnya kebutuhan fisik, ekonomi, keamanan, pendidikan, dan segala sesuatu untuk dapat hidup cukup, meskipun *happiness* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material. Lalu kira-kira jika tujuan negara yang dimaksud Aristoteles sudah demikian baiknya mengapa Indonesia dengan Papua Barat terjadi kerusuhan ? jawaban ini kembali lagi pada pertanyaan bagaimana dengan tujuan negara yang dimaksud Aristoteles ini sudah tercapai apa belum ? sudah terpenuhi apa belum ? sudah terwujud apa belum ? jika kita lihat dari keyataannya yang terjadi di Papua Barat sekarang dari segi ekonomi sungguh sangat jauh berbeda dari kota-kota besar lainnya. Jadi keadaan ekonomi Papua Barat mengalami kemerosotan. Pertumbuha ekonomi yang semakin memburuk hal ini lalu

mengakibatkan pembangunana di Papua menjadi tidak merata, keamanan Papua memburuk, dan pendidikan di Papua masih sangat minim. Jika begitu berarti segala macam sesuatu untuk hidup cukup di Papua masih belum terpenuhi.

Tidak hanya itu, *Happiness* yang dimaksudkan oleh Aristoteles juga menunjuk pada “realisasi prinsip-prinsip keadilan dalam tata hidup bersama”. Apa maksud dari pernyataan Aristoteles ini ? maksudnya tentu saja sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi, keadilan itu sangat penting. Keadilan menunjuk kepada “*equality*” yang memiliki karakteristik proporsional, bukan sekedar asal sama. Proporsional artinya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Apabila seseorang telah melakukan jasa lebih dari yang lain, dia memiliki pembagian lebih dari yang lain yang kurang berjasa. Itulah yang disebut dengan keadilan. Dan hal ini juga belum terjadi di Papua. Kita tahu bahwa Papua adalah salah satu pulau yang kekayaan alamnya sangat berlimpah. Dan ini tentu saja setiap tahunnya selalu berkontribusi dengan perekonomian Indonesia, namun apa yang terjadi di Papua ? kekayaan alam dan berbagai macam hasil alam Papua selalu digali dan diperjual belikan. Namun meskipun Papua selalu berkontribusi dengan perekonomian Indonesia tapi tidak dengan sebaliknya. Artinya Indonesia tidak bisa berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian Papua dan kehidupan masyarakat Papua semakin memburuk. Hal ini berarti kebahagiaan di Papua masih belum tercapai.

Kebahagiaan juga menunjuk pada aktivitas yang menghasilkan apa-apa yang mengatasi sekedar pemenuhan kebutuhan material. Aktivitas semacam ini nyata dalam apa yang disebut *leisure time* (waktu luang). Konsep “*the good life*” yang merupakan tujuan hidup bersama menyertakan pula realitas bahwa para anggota memiliki waktu luang. *Leisure* bukan waktu menganggur, juga bukan sekedar waktu istirahat (tidak berbuat apa-apa), melainkan saat dimana orang dapat membangun kedalaman kemanusiaannya. Waktu luang adalah saat belajar, berkomunikasi, berdiskusi, berkontemplasi, mendulang kedalaman. Peradaban Yunani kuno pada waktu itu kaya dengan aneka aktivitas humanis seperti sastra, puisi, retorika, filsafat, seni, dan seterusnya. Aneka aktivitas tersebut belum terealisasi dalam dunia seperti sekarang ini yang kita miliki dalam buku, majalah, surat kabar, dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas itu dihadirkan dalam suatu pertemuan-pertemuan di tempat-tempat terbuka, di taman-taman, di dekat kuil-kuil, dan sejenisnya. *Leisure* yang dimaksudkan Aristoteles munujuk pada aktivitas-aktivitas yang memang sangat membangun peradaban budaya, filsafat dan humanisme. Namun tujuan negara Aristoteles yang ketiga ini bukan hanya di Papua saja yang belum terwujud, melainkan juga di seluruh tanah air Indonesia. Mengapa bisa seperti demikian ? apa penyebabnya ? hal ini terjadi tentu saja karena banyak manusia yang belum menyadari betapa pentingnya *leisure* tersebut. Maka jika hal ini belum bisa berjalan maka sebenarnya kebahagiaan yang dimaksud oleh Aristoteles itu juga belum bisa terwujud karena, kebahagiaan atau *eudaemonia* harus pula tampak dalam aktivitas yang merealisasi keutamaan (*virtues*). Aristoteles memandang bahwa kesempurnaan manusia terpenuhi dalam sistem atau tata hidup bersama. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan manusia ? Aristoteles tidak sedang menjelaskan kesempurnaan hidup

rohani atau spiritual, melainkan sosialitas hidup manusia. Natura manusia yang adalah makhluk politik mau tidak mau meminta manusia untuk memperdalam dan mengembangkan dan memperdalam kapasitas-kapasitasnya. Yang dimaksud dengan kapasitas disini ialah segala kemampuan manusia untuk menampilkan keutamaan-keutamaan manusiawinya. Kebahagiaan, dalam filsafat Aristoteles, bukan sesuatu yang statis, seperti menikmati, melainkan dinamis seperti aktivitas mengusahakan dan menapilakan keutamaan-keutamaan kemanusiaan. Di sinilah kesempurnaan manusia terealisasi, yaitu dalam aktivitas mendulang sekaligus menjabarkan dalam hidup sehari-hari keutamaan-keutamaan hidupnya.

2. Kasus Papua Barat di Tinjau dari Tujuan dan Legitimasi Negara Pancasila

Dari tujuan dan legitimasi negara pancasila kita tahu bahwa negara itu didirikan dengan sebuah alasan yang mendasar (*raison d'etre*) yaitu alasan-alasan yang secara mendalam memungkinkan pemerintahan negara itu dibangun, didirikan, dan diadakan. Legitimasi ialah itu yang menjadikan pendiri suatu pemerintahan bersifat legitim, sah, dan benar. Plato mengemukakan suatu alasan mendalam tentang pembentukan *polis* (yang memiliki sistem hidup bersama seperti negara) untuk pemenuhan kebutuhan, agar para anggotanya berkecukupan. Seperti yang tertulis dalam mukadimah UUD 1945 pada alenia keempat yang memuat tujuan dan legitimasi negara Indonesia, yakni yang berbunyi “Atas nama berkat Allah Yang Mahakuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Isi dari UUD 1945 ini bisa kita lihat bahwa sesungguhnya tidak hanya memuat legitimasi politis atau konstitusional namun juga memuat moral, dan bahkan religius dari bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa legitimasi politis dan moral bukanlah duahal yang terpisah, melainkan dua dimensi yang saling menyatu, namun bisa dibedakan dari apa yang disebut sebagai mandat kedaulatan rakyat. Lebih jelasnya makna dari alenia keempat UUD 1945 ini yaitu berkaitan dengan tujuan negara yang hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat

tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara sehingga, secara bertahap terwujud cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat adil dan mekmur. Dan alenia keempat UUD juga memuat dasar negara pancasila yang merupakan suatu kebulatan yang utuh, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rumusan pancasila ini dimuat dalam pembukaan UUD jadi secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku dan, mengikat seluruh lembaga negara, masyarakat dan setiap warga negara. Namun apakah selama Indonesia merdeka ini papua sudah merasakan semua itu ? pada kenyataannya dari awal masuk kedalam pemerintahan atau negara Indonesia papua merasa bahwa dirinya diombang-ambingkan. (Sugeng. 2015)

KESIMPULAN

Mengayomi masyarakat, terutama memberikan pemerataan keadilan terhadap seluruh warga negara Indonesia bukanlah hal yang mudah. Pro-kontra merupakan hal yang wajar, tergantung bagaimana cara menyikapinya. Keinginan Papua untuk menjadi negara sendiri, belum tentu dapat mengubah perekonomian Papua menjadi lebih baik. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan menjadi negara sendiri bukanlah hal yang mudah. Indonesia berusaha memberikan keadilan dengan cara perbaikan infrastruktur di Papua. Namun, adanya keinginan manusia yang tidak cepat mudah puas akan membutuhkan masyarakat Papua untuk bertindak nekad ingin menjadi negara sendiri. Maka perlunya pemikiran yang matang sebelum bertindak, karena hal ini akan berpotensi berakibat fatal jika pemisahan negara sendiri terjadi, bukannya menjadi negara yang maju dan sejahtera justru sebaliknya yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2019/08/05/155532226/pertumbuhan-ekonomi-papua-dan-papua-barat-negatif-di-kuartal-ii-2019?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15755555887478&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s. Diunduh pada 21 November 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa_dan_kerusuhan_Papua_2019. Dinduh pada 21 November 2019.

<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/makna-alinea-keempat-pembukaan-uud-1945.html?m=1>. Dinduh pada 21 November 2019.

Dewantara, Agustinus. “*Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*”. Yogyakarta: Kanisius.